

Editor:

Dr. K. Faiq Tobroni, S.H.I., M.H., M.Sc., M.S.I.

TAJDID PANCASILAIS

PROF. K.H. YUDIAN WAHYUDI, PH.D.



Penulis:

Roni Ismail

Mohamad Solikudin

Reni Susanti

Tri Wibowo

TAJDID PANCASILAIS
Prof. K.H. Yudian Wahyudi, Ph.D.

UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Ketentuan Pidana

Pasal 113

- (1) Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

TAJDID PANCASILAIS

Prof. K.H. Yudian Wahyudi, Ph.D.

Editor:

Dr. K. Faiq Tobroni, S.H.I., M.H., M.Sc., M.S.I.

Penulis:

Roni Ismail

Mohamad Solikudin

Reni Susanti

Tri Wibowo

TAJDID PANCASILAIS
Prof. K.H. Yudian Wahyudi, Ph.D.

Penulis:

Roni Ismail, Mohamad Solikudin, Reni Susanti, Tri Wibowo

Editor dan Kata Pengantar:

Dr. K. Faiq Tobroni, S.H.I., M.H., M.Sc., M.S.I.

Tata Letak:

Ardhan Irfan, S.Hum.
Ahmad Masfuful Fuad, S.Sy., M.H.I.

Desain Visual Cover:

Janur Jene

Penerbit:



Rejowinangun, KG I/385 Rt. 27 Rw. 09 Kotagede, Yogyakarta

E-mail: cakrawalamind@gmail.com

Tebal: xxviii + 96 halaman
ISBN 978-623-7362-93-7
Cetakan Pertama, 2025

Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang
Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian
Atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

Kata Pengantar — vii

Daftar Isi — xxiii

Bab I Pemikiran Kontra Khilafah Yudian Wahyudi melalui
Reinterpretasi atas Q.S. Al-Baqarah Ayat 30
Oleh: *Roni Ismail* — 1

Bab II Mandat Khilafah dan Kisah Adam dalam Perspektif
Hermeneutika Yudian Wahyudi
Oleh: *Mohamad Solikudin* — 21

Bab III Analisis Pemikiran Yudian Wahyudi tentang Islam Pasrah
Menuju Islam sebagai Proses
Oleh: *Reni Susanti* — 39

Bab IV Eksplikasi Pendidikan Islam Integratif-Aplikatif: Studi Pemikiran
Kyai Yudian Wahyudi
Oleh: *Tri Wibowo* — 65

Penutup — 91

Indeks — 97

BAB I

PEMIKIRAN KONTRA KHILAFAH

YUDIAN WAHYUDI

Melalui Reinterpretasi atas

Q.S. Al-Baqarah Ayat 30

PEMIKIRAN KONTRA KHILAFAH YUDIAN WAHYUDI

Melalui Reinterpretasi Atas

Q.S Al-Baqarah Ayat 30

Oleh: Roni Ismail^{1*}

A. PENDAHULUAN

Masih banyak kaum muslim memahami ayat 30 dari Surat Al-Baqarah yang berbunyi: “Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat 'Sesungguhnya Aku hendak menjadikan *khilafah* di bumi...’² sebagai perintah permanen dan berskala global atau transnasional untuk mendirikan sistem kenegaraan model Islam yang disebut *khilafah*. Begitu juga ayat-ayat sejenis seperti Surat As-Sad ayat 26 dengan konteks subjeknya Daud a.s.³ dan juga Surat An-Nur ayat 55⁴ dipahami secara sama sebagai perintah Allah kepada umat Islam untuk mendirikan *khilafah* tunggal. Di Indonesia kelompok yang memiliki konsep *khilafah* yang sangat detail adalah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).⁵ Menurut Yudian Wahyudi, mis-interpretasi atas Surat Al-Baqarah ayat 30 yang demikianlah yang menjadi pangkal kesalahan sebagai umat Islam yang meyakini pendirian sistem pemerintahan *khilafah* sebagai perintah dari ayat tersebut.

Pemahaman di atas melahirkan kepercayaan terkait selanjutnya bahwa pendirian *khilafah* secara tunggal di atas merupakan kewajiban keagamaan

^{1*}Penulis Adalah Mahasiswa Program Doktor (S3) Studi Islam Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, NIM: 22300012014.

²Subjek *khilafah* dari QS. Al-Baqarah ayat 30 ini adalah Adam a.s. Muhammad Nasib ar-Rifa'i, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir, Jilid I*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), hlm. 103.

³“Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu *khilafah* di bumi, maka berilah keputusan di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia menyesatkan kamu dari jalan Allah.”

⁴“Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal saleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasaan (*khilafah*) di muka bumi.”

⁵Muhammad Rafiuddin, “Mengenal HizbutTahrir (Studi Analisis Ideologi Hizbut Tahrir vis a vis NU”, *Islamuna: Jurnal Studi Islam*, Vol. 2, No. 1, 2015.

semua umat Islam seantero dunia tanpa terkecuali. Semua umat Islam, bagi mereka, wajib berjihad untuk bersama-sama mewujudkan negara satu *khilafah* di dunia ini. Tidak mengherankan, ketika Al-Bahgdadi pada 29 Juni 2013 mendeklarasikan ISIS sebagai *khilafah* mewakili umat Islam sedunia, bagi umat Islam yang memiliki keyakinan ini bersedia sumpah setia (*bai'at*) pada kepemimpinan ISIS Al-Bahgdadi ini. Abu Bakar Ba'asyir, misalnya, melakukannya di Lapas Nusa Kambangan, dan banyak sekali yang berangkat ke Suriah dari berbagai negara untuk bergabung secara langsung dengan kepemimpinan *khilafah* ISIS Al-Baghdadi baik sebagai kombatan maupun non kombatan.⁶

Mereka yang pro *khilafah* bahkan sampai rela berangkat ke Suriah dengan biaya sendiri-sendiri untuk bergabung dengan ISIS karena mereka memiliki keyakinan bahwa jika sebuah *khilafah* sudah didirikan, maka umat Islam wajib untuk *bai'at* dan bergabung secara fisik. Selain itu, semua sistem kenegaraan non-*khilafah* dianggap oleh pihak pro *khilafah* sebagai *thogut* atau kesesatan, karena tidak menjadi Islam sebagai dasar negara dan pemerintahan. Negara bangsa ini, terlebih sistem demokrasi di dalamnya, bukanlah ajaran Islam dan bahkan justru merintangi terbentuknya kesatuan *khilafah* ini.⁷ Negara bangsa, demokrasi, dan semua *thogut* ini, bagi pro *khilafah*, harus dilawan dengan cara apa pun, termasuk kekerasan, sehingga menjadikan sebagian pro *khilafah* radikal dan membolehkan teror.⁸

Penulis melihat salah satu penyebab kondisi ini adalah kesalahpahaman serius atas penafsiran Surat Al-Baqarah ayat 30 sebagai perintah keagamaan untuk mendirikan sistem kenegaraan *khilafah*, padahal ayat tersebut adalah tentang desain Allah SWT menjadikan Adam a.s. dan di ayat lain Daud a.s di Surat As-Sad ayat 26 sebagai *khalifah* (wakil) di bumi, bukan

⁶"Evolusi ISIS di Indonesia", Laporan IPAC Report No.13, 24 September 2014

⁷Wael B. Hallaq, *Ancaman Paradigma Negara Bangsa (Islam, Politik dan Problem Moral Identitas)*, terj. Akh. Minhajji, (Yogyakarta: Suka Press, 2015).

⁸Ditulis Yudian Wahyudi, dalam konteks partai politik di Indonesia terjadi dua kubu tentang upaya penerapan syariat Islam secara formal. PKS, PBB, dan PPP merupakan partai-partai politik yang menggunakan simbol-simbol Islam secara formal dan berkeinginan kuat untuk menegakkan syariah secara formal, bisa jadi *khilafah* atau sejenis seperti negara Islam. Sedangkan, aliran simbiotik yang substansialis, seperti PKB dan PAN, tidak mau menggunakan simbol-simbol Islam, lebih menggunakan ideologi Pancasila dan tidak ingin memperjuangkan syariat Islam secara formal. Kedua partai nasionalis religius ini hanya ingin menegakkan nilai-nilai universal syariah seperti keadilan, persamaan, kemerdekaan, musyawarah, dan supremasi hukum. Lihat, Yudian Wahyudi, *Hukum Islam antara Filsafat dan Politik*, (Yogyakarta: Pesantren NaweseaPress, 2015), hlm. 156.

perintah kepada Adam untuk mendirikan *khilafah*. Di antara pemikir Muslim Indonesia berkaliber dunia yang melakukan pemikiran keislaman kontra *khilafah* dengan reinterpretasi Surat Al-Baqarah ayat 30 adalah Yudian Wahyudi, baik dari segi bahasa maupun substansi ayat. Beliau adalah seorang akademisi berlatar belakang *pondokan* (santri) yang berhasil mencapai *sekolahan* (sekolah di universitas) di IAIN dan *londonan* (sekolah di Barat) di McGill dan Harvard sekaligus. Saat ini, Yudian Wahyudi memiliki posisi strategis dalam mensosialisasikan atau membumikan gagasan kontra *khilafah* ini sehubungan dengan posisi (*kursiy*) beliau sebagai Kepala BPIP RI sampai tahun 2027 untuk periode kedua kalinya.

Makalah ini akan menguraikan tentang bagaimana pemikiran kontra *khilafah* Yudian Wahyudi melalui reinterpretasi QS Al-Baqarah ayat 30 hanya melalui kebahasaan saja, menurut keyakinan beliau, sudah membantalkan argumen-argumen para pendukung *khilafah*. Ditambah lagi, beliau merujuk substansi Surat Al-Baqarah ayat 30 tersebut dihubungkan dengan interpretasi tentang *al-asma'* sebagai konsep kunci ke-*khalifah*-an dalam ayat 30 dari Surat Al-Baqarah tersebut, semakin memposisikan pemikiran atau gagasan kontra *khilafah* Yudian Wahyudi lebih kuat *nan* kokoh.

B. REINTERPRETASI Q.S AL-BAQARAH AYAT 30 SEBAGAI GAGASAN KONTRA KHILAFAH YUDIAN WAHYUDI

1. Sekilas tentang Yudian Wahyudi

Biografi Yudian Wahyudi terbaru yang ditulis dengan narasi ilmiah di antaranya ditulis oleh Waryani Fajar Riyanto dalam buku “*Universalitas Pancasila Yudian Wahyudi. Percikan Biografi Intelektual, Spiritual, dan Internasional*”. Penulis menggambarkan Yudian Wahyudi sebagai sosok sangat langka yang merupakan integrasi antara sosok intelaktual dengan Guru Besar/Profesor yang diraihnya, sosok spiritual dengan Kyai Haji (K.H.) yang disandang, pendiri tarekat, pimpinan Pesantren Nawesea, dan Sholat Hajat 30 tahun lebih yang dijalankan secara istiqomah, dan sosok internasional dengan Ph.D yang disandangnya dari McGill University

Montreal Kanada, dan keilmuannya diakui secara internasional.⁹

Yudian Wahyudi lahir di Balikpapan 17 April 1960 dari keluarga militer. Pendidikan beliau dimulai dari Madrasah Darut Ta'lim Kampung Damai Balikpapan (1967-1970), SDN 55 Jalan Baru Balikpapan (1970-1972), SDN Tremas, Pacitan (1973), Pesantren Tremas, Pacitan (1973-1978) dan Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta (1978-1979). B.A. dan Drs. diperoleh dari Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga (1982 dan 1987), B.A. dari Fakultas Filsafat UGM (1986). MA dan Ph.D dalam bidang *Islamic Studies* diperoleh dari McGill University Kanada pada 1993 dan 2002. Visiting Scholar di Harvard Law School, Boston, Amerika Serikat ditempuh pada 2002-2004. Yudian Wahyudi pernah menjadi Professor *Islamic Studies* di Tufts University, Medford, Massachusset, Amerika Serikat (2004-2005), anggota American Association of University Professor (2005-2006), dan menjadi Profesor Maqashid Syari'ah di Georg-August-Universität Göttingen, Jerman (2017). Yudian Wahyudi menjadi Guru Besar dalam bidang Filsafat Hukum Islam sejak tahun 2008.¹⁰

Sebagai ilmuan Yudian Wahyudi telah menerjemahkan lebih dari 52 buku terjemahan, puluhan artikel jurnal internasional, dan telah memperäsentasikan puluhan makalah di forum-forum internasional. W. F. Riyanto, dalam uraian biografi Yudian Wahyudi, menuliskan tentang pemikiran-pemikiran beliau dalam bentuk buku. Tiga buku ditulis Yudian Wahyudi tentang kajian integrasi ushul fikh dengan hermeneutika, yaitu: *Ushul Fikih versus Hermeneutika: Membaca Islam dari Kanada dan Amerika*,¹¹ *Dekonstruksi Hermeneutika* (2008), dan, *Hermeneutika sebagai Pengganti Ushul Fikih* (2009). Yudian Wahyudi juga buku-buku bernuansa pergumulan ilmu syari'ah dengan isu-isu politik seperti: *Dimanika Politik "Kembali Kepada Al-Qur'an dan Sunnah" di Mesir, Maroko, dan Indonesia*,¹²

⁹Waryani Fajar Riyanto, *Universalitas Pancasila Yudian Wahyudi. Percikan Biografi Intelektual, Spiritual, dan Internasional*, (Yogyakarta: Suka Press, 2021),hlm. 1-19.

¹⁰Akso, *Modernisasi Pendidikan Islam Pondok Pesantren Nawesea Yogyakarta menjadi Lembaga Pendidikan Islam Unggul Kelas Dunia: Pendiri Prof K.H. Yudian Wahyudi, BA., BA., Drs., M.A., Ph.D.* (Yogyakarta: Cakrawala, 2023),hlm. 193-196.

¹¹Yudian Wahyudi, *Ushul Fikih versus Hermeneutika: Membaca Islam dari Kanada dan Amerika* (Yogyakarta: NawaseaPress, 2007).

¹²Yudian Wahyudi, *Dimanika Politik "Kembali Kepada al-Qur'an dan Sunnah" di Mesir, Maroko, dan Indonesia* (Yogyakarta: NawaseaPress, 2010).

ayat-ayat setelahnya 31 s.d. 34. Dalam semua rangkaian ayat tersebut, dalam pemikiran Yudian Wahyudi, Al-Quran sama sekali tidak pernah menggunakan kata *khilafah*.¹⁵ Bahkan, dalam keseluruhan Al-Quran, kata *khilafah* tidak pernah digunakan sama sekali.

Surat Al-Baqarah ayat 30 jelas sama sekali bukan merupakan perintah Allah SWT agar Adam dan umat Islam mendirikan sistem kenegaraan *khilafah* sekarang ini, karena dalam ayat tersebut tidak disebutkan dan hanya disebut kata *khalifah* bukan *khilafah*. *Khalifah* pun dalam Surat Al-Baqarah ayat 30 ini, dalam pemikiran Yudian Wahyudi, tidaklah bermakna kepemimpinan politik sehingga rawan dibelokkan semakna dengan *khilafah*. Karena tidak bermakna kepemimpinan politik ini, Yudian Wahyudi memaknai *khalifah* sebagai orang yang mampu mengelola *khilaf* (kesalahan) dan *ikhtilaf* (perbedaan atau kebhinekaan) sehingga ia memiliki kesempatan untuk melanjutkan, mewakili, dan bahkan menggantikan seseorang. Dikatakan bahwa jika tidak mampu, maka tempatnya adalah di belakang (*khalaq*). Pemaknaan Yudian Wahyudi seperti ini merupakan pencermatan atas akar kata *khalifah*, yaitu *kho*, *lam*, dan, *fa*, yang membentuk kata *khalifah*, *khilaf*, dan *ikhtilaf*.¹⁶ *Khalifah* dalam Surat Al-Baqarah ayat 30 ini, ditegaskan Yudian Wahyudi, jelas-jelas tidak bermakna kepemimpinan politik.

Pemahaman ini sangat baru karena para pendukung *khilafah* biasa menjadikan ayat tersebut sebagai argumen normatif (*dalil*) kewajiban umat Islam mendirikan suatu sistem kenegaraan Islam tunggal bersifat global yang disebut *khilafah* ini. Menurut Yudian Wahyudi, ayat 30 Surat Al-Baqarah hanyalah informasi atau kabar dari Allah SWT kepada malaikat tentang akan dijadikannya Adam sebagai *khalifah*, sehingga jelas bukan perintah kepada Adam untuk mendirikan sistem kenegaraan *khilafah*. Al-Quran sama sekali tidak pernah menggunakan kata *khilafah*.¹⁷

Yudian Wahyudi bahkan melakukan reinterpretasi yang benar-benar baru atas Surat Al-Baqarah ayat 30 ini bahwa kehendak Allah SWT meng-

¹⁵Saidurrahman dan Azhari Akmal Tarigan, *Rekonstruksi Peradaban Islam: Perspektif Prof. K.H. Yudian Wahyudi*, Ph.D. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hlm. 134-135.

¹⁶Saidurrahman dan Azhari Akmal Tarigan, *Rekonstruksi Peradaban Islam*, hlm. 136.

¹⁷Yudian Wahyudi, "Perkuliahannya Mata Kuliah Studi Islam: Teks, Konteks, dan Metodologi", Program Doktor (S3) Studi Islam, Pascasarjana, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

angkat *khalifah* di muka bumi secara konstitusional Indonesia merupakan hak setiap warga negara Indonesia sebagai calon Presiden RI. Tafsir baru ini, ditulis Riyanto,¹⁸ sebagai integrasi Kitab Suci dengan konstitusi. Dengan pemahaman baru ini, Yudian Wahyudi hendak menegaskan bahwa untuk menjadi *khalifah* Allah harus dilakukan di bumi Indonesia dengan sistem kenegaraan dan pemerintahan yang sudah dibangun bersama berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Oleh karena itu, menjadi *khalifah* di Indonesia adalah berdasarkan Pancasila, bukan berdasarkan sistem pemerintahan *khilafah*.¹⁹

Gagasan kontra *khilafah* di atas merupakan pemaknaan atau reinterpretasi Yudian Wahyudi atas kata *khalifah* dalam Surat Al-Baqarah ayat 30. Kata tersebut bukan *khilafah* dan tidak ada satu kata pun dalam Al-Quran ditemukan kata *khilafah*. Al-Quran sama sekali ditegaskan Yudian Wahyudi tidak pernah menggunakan kata *khilafah*. Jelas sangat mudah bagi Yudian Wahyudi untuk melakukan kontra *khilafah* ini, yaitu hanya dengan melakukan reinterpretasi secara kebahasaan semata atas Q.S Al-Baqarah ayat 30 ini. Yudian Wahyudi juga menggali makna substansi dari ayat tersebut, sehingga semakin menguatkan pemikiran kontra *khilafah* dari segi kebahasaan, sebagaimana akan diuraikan setelah bagian ini.

3. Makna Substantif Surat Al-Baqarah ayat 30

Dalam memaknai secara substansi Surat Al-Baqarah ayat 30 sebagai bagian dari pemikiran kontra *khilafah*, Yudian Wahyudi mengajukan penjelasan lain yang sangat orisinal bahwa ayat tersebut bukanlah diturunkan dalam konteks kepemimpinan politik modern. Oleh karena itu, *khalifah* menurut Yudian Wahyudi bukanlah dalam pengertian kepala negara, gubernur, bupati dan wali kota seperti dalam kepemimpinan politik saat ini. Pengertian *khalifah* pada ayat tersebut mencakup seluruh umat manusia dan sejatinya berkenaan dengan identitas manusia sebagai pengelola Bumi dan hamba Allah sekaligus.²⁰ Inilah makna umum dari kata

¹⁸Waryani Fajar Riyanto, *Universalitas Pancasila Yudian Wahyudi*, hlm. 574.

¹⁹Yudian Wahyudi, *Maqashid Syari'ah dalam Pergumulan Politik* (Yogyakarta: NawaseaPress, 2007), hlm. 19-38.

²⁰Saidurrahman dan Azhari Akmal Tarigan, *Rekonstruksi Peradaban Islam*, hlm. 137.

khalifah dalam ayat 30 dari Surat Al-Baqarah tersebut.

Sebagai *khalifah* manusia berkewajiban mengelola alam dengan bijak untuk kemakmuran seluruh isi alam semesta; manusia, binatang, alam dan lainnya. Menurut Yudian Wahyudi, Surat Al-Baqarah ayat 30 pada hakikatnya berbicara tentang sumber daya manusia (SDM) yang harus terus menerus dirawat agar melahirkan generasi yang memiliki daya saing dan menang tanding. Kata-kata tersebut sangat khas Yudian Wahyudi. Dengan masih merujuk ayat yang sama, Yudian Wahyudi menjelaskan dua syarat mutlak untuk menjadi *khalifah*, yaitu: penguasaan *al-asma'* dan menang tanding dalam sebuah kompetisi.²¹ Jelas bagi Yudian Wahyudi dari dua syarat *khalifah* ini, tidak ada syarat yang bernuansa keagamaan untuk menjadi *khalifah* di muka bumi ini. Poin ini menarik untuk terus dikaji, sehingga akan diketahui siapa yang menjadi *khalifah* saat ini di dunia ini menurut pemikiran *khalifah* Yudian Wahyudi ini.

Syarat pertama menjadi *khalifah* adalah penguasaan *al-asma'*. Bagi Yudian Wahyudi, untuk saat ini, yang menjadi *khalifah* di dunia ini karena telah menguasai *al-asma'* adalah Amerika Serikat karena Amerika menguasai hampir seluruh teknologi militer, ilmu ekonomi dan IT terbaru. Di antara syarat penguasaan *al-asma'*, menurut Yudian Wahyudi, adalah penguasaan berbagai *experimental and technological sciences* yang kesemuanya tidak dikuasai oleh umat Islam. Perhatian Yudian Wahyudi terhadap kemutlakan penguasaan *al-asma'* ini sangat besar karena posisi strategis bagi Yudian sebagai syarat menjadi *khalifah* di muka bumi ini; menjadi unggul dan menang kompetisi.

Al-asma' bagi Yudian Wahyudi, berbeda dengan para mufassir sebelumnya, harus dipahami dengan cara berbeda sekaligus dijadikan konsep kunci syarat ke-*khalifah-an* di muka bumi ini. Penguasaan *al-asma'* bagi Yudian Wahyudi merupakan syarat menjadi *khalifah* di bumi ini. *Al-asma'* bagi Yudian Wahyudi tidak terbatas pada kemampuan konseptual, tetapi juga ilmu-ilmu yang bersentuhan dengan kehidupan manusia dan alam, yaitu *experimental and technological sciences* tadi sebagai persyaratan kebangkitan peradaban, tanpa menolak ilmu-ilmu sosial humaniora. *Al-asma'* bahkan,

²¹Saidurrahman dan Azhari Akmal Tarigan, *Rekonstruksi Peradaban Islam*, hlm. 138.

bagi Yudian Wahyudi, dipahami sebagai penguasaan alat-alat perang²² untuk mendukung syarat kedua menjadi *khalifah* di bumi “unggul dan menang tanding” di bawah ini.

Adapun syarat *khalifah* yang *kedua* menang tanding dalam suatu kompetisi masih juga, menurut Yudian Wahyudi, dipegang oleh Amerika karena tidak ada negara yang mampu mengalahkannya dalam teknologi militer, ilmu ekonomi dan IT. Amerika masih menang dan unggul atas negara-negara maju lainnya. Kata Yudian Wahyudi, hampir bisa dipastikan sampai detik ini tidak ada negara yang mampu secara riil mengalahkan Amerika Serikat, baik dalam bidang persenjataan, angkatan perang, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.²³

Kata *khalifah* dalam Al-Quran karenanya menurut Yudian Wahyudi, benar-benar tidak menunjukkan makna politik dan kepemimpinannya seperti dipahami oleh HTI yang menyatakan kewajiban umat Islam untuk mendirikan sistem *khilafah* karena Pancasila dianggap HTI bukanlah dasar kenegaraan dan pemerintahan Islam. Pancasila dan demokrasi harus diganti dengan sistem *khilafah* yang menurut mereka berasal dari ajaran Islam dan warisan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat beliau.

Meskipun memiliki pandangan bahwa Surat Al-Baqarah ayat 30 bukan merupakan perintah mendirikan sistem *khilafah*, Yudian Wahyudi menegaskan bahwa kita tidak boleh mempertentangkan Pancasila dengan *khilafah*. Yudian Wahyudi kemudian menegaskan bahwa Pancasila tidak membutuhkan *khilafah* sebagai sistem pemerintahan. Akan tetapi, Pancasila membutuhkan sebanyak mungkin *khalifah* di berbagai bidang agar menang tanding di berbagai bidang pula. Dibutuhkan para *khalifah* di bidang kedokteran, hukum, teknik, kelautan, teknologi militer, pendidikan, ekonomi, IT dan lain-lain agar Indonesia bisa mulai menang tanding dalam bidang-bidang kehidupan. Dari sinilah Yudian Wahyudi setuju dengan slogan: *khalifah* “yes”, *khilafah* “no” sebagai pemaknaan kebahasaan dan konteks atas Surat Al-Baqarah ayat 30 ini, sebagaimana penulis uraikan pada bagian tulisan di bawah ini.

²²Saidurrahman dan Azhari Akmal Tarigan, *Rekonstruksi Peradaban Islam*, hlm. 141.

²³Saidurrahman dan Azhari Akmal Tarigan, *Rekonstruksi Peradaban Islam*, hlm. 139.

C. KHALIFAH “YES”, KHILAFAH “NO”

Dalam mengemukakan pemikiran *khalifah* “yes” *khilafah* “no”-nya, Yudian Wahyudi tetap konsisten berargumenkan Surat Al-Baqarah ayat 30 bahwa ayat tersebut yang tidak menyebut *khilafah*, tetapi *khalifah*. *Khalifah* sebagai SDM yang unggul dan menang tanding di atas, sangat dibutuhkan Pancasila, bahkan banyak *khalifah* di berbagai bidang kehidupan seperti kedokteran, ekonomi, teknologi militer, IT, pendidikan dan lain-lain. Jelas, menurut Yudian Wahyudi, Pancasila sangat membutuhkan banyak *khalifah* agar Pancasila memiliki banyak *asma'* untuk dapat tetap bersaing dan menang tanding. Adapun *khilafah* sebagai sistem pemerintahan, menurut Yudian Wahyudi, tidak dibutuhkan Pancasila dan sudah mati seiring tumbangnya Turki Ustmani pada 1924. Inilah makna dari pemikiran Yudian Wahyudi tentang *khalifah* “yes” *khilafah* “no” ini.

“No” untuk *khilafah* ini, bagi Yudian Wahyudi, karena memang *khilafah* oleh para *founding fathers* tidak dijadikan *ijma'* kebangsaan. Ia bukan solusi bagi bangsa Indonesia. Tidak ada satu orang pun dari *founding fathers* mengusulkan *khilafah*, apalagi dijadikan ‘*ijma* atau konsensus kebangsaan bersama.²⁴ Fakta historis ini, bagi Yudian Wahyudi, menunjukkan bahwa Pancasila tidak membutuhkan *khilafah*, ia hanya membutuhkan *khalifah-khalifah* atau para *khalifah* (orang-orang profesional dalam bidangnya).

Menurut Yudian Wahyudi, upaya pendirian sistem kenegaraan *khilafah*, seperti salah satunya didengungkan oleh HTI sebelum dibubarkan, merupakan pemberontakan terhadap konsensus atau *ijma'* para *founding fathers* bangsa ini yang menyetujui dasar negara Pancasila dalam bentuknya sekarang ini. Umat Islam, bagi Yudian Wahyudi, tidak boleh bermimpi *khilafah* di Indonesia karena Indonesia memiliki konsensus Pancasila yang sejalan dengan Piagam Madinah. Umat Islam, menurut Yudian Wahyudi, harus bersyukur dengan adanya Pancasila ini dengan mengoptimalkan profesionalitas dan peningkatan kemampuan kompetisi dalam rangka beribadah kepada Allah SWT dalam bingkai Pancasila, UUD RI, Kebhinnekaan, dan NKRI.²⁵ Oleh karena itu, upaya pendirian *khilafah* sangat

²⁴Waryani Fajar Riyanto, *Universalitas Pancasila Yudian Wahyudi*, hlm. 582-583.

²⁵Waryani Fajar Riyanto, *Universalitas Pancasila Yudian Wahyudi*, hlm. 585.

dilarang di Indonesia, tetapi kemampuan para *khalifah* sangat dibutuhkan bangsa dan negara ini.

Dengan demikian, Yudian Wahyudi anti *khilafah*, tetapi pro *khalifah* untuk keunggulan dan menang tanding bangsa dan negara ini. Pemikiran *khalifah* “yes” *khilafah* “no” ini merupakan paket dari pemikiran kontra *khilafah*-nya Yudian Wahyudi. Yudian Wahyudi selanjutnya menegaskan segala upaya melawan Pancasila, termasuk melalui sistem *khilafah*, merupakan upaya melawan *ijma'* Pancasila sebagai hukum tertinggi dalam bernegara, dan melawan *ijma'* tersebut adalah melawan Tuhan. Melawan Tuhan merupakan perbuatan dosa teologis yang sangat besar. Pandangan Yudian Wahyudi ini akan diuraikan di bawah ini.

D. MENDIRIKAN KHILAFAH: MELAWAN IJMA' PANCASILA DAN MELAWAN TUHAN

Pancasila dalam pemikiran Yudian Wahyudi bukan saja sebagai ideologi terbuka seperti dikatakan oleh Nurcholish Madjid. Akan tetapi, lebih dari itu, Pancasila baginya adalah ideologi yang hidup. Pandangan ini, menurut Wardah Nuroniyah,²⁶ merupakan kelanjutan dari gagasan Nurcholish Madjid tadi. Perbedaan antara ke dua pandangan tentang Pancasila ini, jika ideologi terbuka dimaknai sebagai ideologi yang tidak stagnan dan menerima ide-ide dari luar, maka pandangan Pancasila sebagai ideologi hidup bersifat lebih dalam lagi yang melihat Pancasila sebagai sesuatu yang memiliki napas sehingga mampu menyelaraskan diri dengan konteks kekininan dan kemungkinan di masa depan.

Yudian Wahyudi memandang bahwa upaya mendirikan *khilafah* di Indonesia berarti melawan Pancasila sebagai *ijma'* (konsensus) bersama para pendahulu bangsa. Beberapa argumen Yudian Wahyudi terkait pandangannya ini dapat penuis uraikan di bawah ini.

Pertama, Pancasila bersifat *theos* dan *antropos* sekaligus yang dalam bahasa fikihnya *ilahi* sekaligus *wad'i*, ditulis Fajar, berarti sama dengan istilah

²⁶Wardah Nuroniyah (ed.), *Membumikan Pancasila Kyai Yudian Wahyudi antara Buuya Syafii Maarif dan Pendeta Andreas Yewangoe*, (Yogyakarta: Cakrawala, 2023), hlm. xi.

teo-antroposentrik integralistik-nya Kuntowijoyo.²⁷ Istilah ini digunakan untuk pengertian bahwa sumber pengetahuan terdapat dua macam, yaitu: berasal dari Tuhan dan berasal dari manusia. Begitupun dengan manusia, terinspirasi nilai-nilai ketuhanan (*theois*) yang dirumuskan bersama-sama sesuai konteks keindonesiaaan (*antropos*).

Kedua, Pancasila merupakan anugerah terbesar Allah SWT abad ke-20 kepada seluruh bangsa Indonesia. Kenyataan ini, bagi Yudian Wahyudi, patut disyukuri karena jika tidak, kenikmatan besar ini akan hancur.²⁸ Yudian, dalam kapasitasnya sebagai kepala BPIP RI, mengajak bersyukur dengan kembali pada persatuan dan konsensus bersama ini dengan melibatkan kaum milenial, *influencer*, dan semua elemen bangsa untuk tertarik dengan Pancasila.

Ketiga, menurut Yudian Wahyudi, Pancasila merupakan ideologi mukjizat unik di abad ke-20 sebagai ideologi pembebasan alternatif karena mampu menyatukan ideologi-ideologi yang bertarung pada waktu 1 Juni 1945.²⁹ Dalam sejarahnya setelah itu, Pancasila selalu dihadapkan dengan berbagai konflik ideologi, bahkan hingga konflik kekerasan. Pemberontakan PKI pada tahun 1948 dan 1965, DI TII/NII, PRRI, Permesta, dan lain-lain sebagai konflik-konflik internal yang berat, tetapi Pancasila tetap mampu mempersatukan kembali bangsa ini.

Keempat, bagi Yudian Wahyudi, Pancasila merupakan ideologi moderat yang menjadi karakter bangsa Indonesia sekaligus sebagai jalan alternatif deradikaliasi. Moderasi khas Indonesia ini merupakan keniscayaan dalam menyelesaikan persoalan-persoalan radikalisme keagamaan dan etnik yang sejalan dengan landasan jiwa, pikiran dan kemerdekaan Indonesia. Dalam nilai-nilai Pancasila, terkandung keinginan semua umat beragama, budaya bangsa dan kearifan lokal bangsa Indonesia.³⁰

Namun demikiran dengan beberapa argumen di atas, Yudian Wahyudi menegaskan bahwa tidak boleh *khilafah* dipertentangkan dengan Pancasila ini. Pancasila bukanlah *thagut*, Pancasila sangat islami. Pancasila dalam ke

²⁷Waryani Fajar Riyanto, *Universalitas Pancasila Yudian Wahyudi*, hlm. 578.

²⁸Waryani Fajar Riyanto, *Universalitas Pancasila Yudian Wahyudi*, hlm. 580.

²⁹Waryani Fajar Riyanto, *Universalitas Pancasila Yudian Wahyudi*, hlm. 581.

³⁰Waryani Fajar Riyanto, *Universalitas Pancasila Yudian Wahyudi*, hlm. 582.

lima silanya sangat berkaitan dengan agama. Pancasila juga merupakan konsensus para pendiri bangsa, yang dalam bahasa ushul fikh-nya adalah *ijma'* atau *kalimatun sawa* dalam bahasa Al-Qur'annya dalam Surat Ali Imran ayat 64.³¹ Dalam konteks *ijma'* ini, menarik untuk ditelaah pemikiran Yudian Wahyudi tentangnya, bahwa dalam konteks bernegara *ijma'* menurut beliau pada kenyataannya lebih tinggi dari kitab suci.

Dalam konteks Pancasila sebagai *ijma'* para pendiri bangsa dulu, dalam pandangan Yudian Wahyudi, orang beragama, terutama kaum Muslim, harus sudah mulai memahami dan menyadari bahwa hukum Tuhan yang mengatur kehidupan sosial politik bukanlah di dalam kitab suci, tetapi konsensus atau *ijma'* sebagai hasil bacaan terhadap kitab suci yang diformulasikan kembali dalam bentuk Pancasila ini.³² Oleh karena itu, menurut Yudian Wahyudi, melawan Pancasila sebagai *ijma'* adalah melawan Tuhan itu sendiri sekalipun dengan konsep *khilafah* yang jelas-jelas tidak berasal dari Al-Qur'an. Upaya mendirikan *khilafah*, karenanya, tidak hanya melawan *ijma'* para pendahulu, tetapi sekaligus melawan Tuhan.³³

Dari sini Yudian Wahyudi memiliki pemikiran lain dalam gagasannya kontra *khilafah*, yaitu: *khilafah* "yes" dan *khilafah* "no". Tentang pemikiran yang satu ini akan diuraikan di bawah ini. Gagasan Yudian Wahyudi *khilafah* "yes" dan *khilafah* "no" sangat kontekstual dalam bingkai keislaman dan keindonesiaaa sekaligus.

E. KESIMPULAN

Dari pembahasan di atas pemikiran atau gagasan kontra *khilafah* Yudian Wahyudi sangat mendasar karena dikembalikan pada pangkal kesalahpahaman atas Surat Al-Baqarah ayat 30 yang sering dijadikan dalil pro *khilafah* untuk melegitimasi pandangan kewajiban umat Islam mendirikan *khilafah* tunggal berskala global. Sedikitnya dapat disimpulkan empat gagasan kontra *khilafah* Yudian Wahyudi berikut ini.

³¹"Katakanlah (Muhammad):Wahai Ahli Kitab, marilah (kita) menuju kepada satu kalimat sama antara kami dan kamu.." (QS Ali Imran: 64). Lihat Abu Nizhan, *Al-Qur'an Tematis* (Bandung: Mizan, 2015), hlm. 205-206.

³²Waryani Fajar Riyanto, *Universalitas Pancasila Yudian Wahyudi*, hlm. 576.

³³Waryani Fajar Riyanto, *Universalitas Pancasila Yudian Wahyudi*, hlm. 585.

Pertama. Yudian Wahyudi menegaskan bahwa dalam Q.S Al-Baqarah ayat 30 hanya ditemukan kata *khalifah*, bukan *khilafah*. Dalam keseluruhan Al-Quran, kata *khilafah* tidak pernah dipergunakan sama sekali. Ayat ini juga dipahami beliau bukan sebagai perintah untuk mendirikan *khilafah* kepada Adam pada khususnya dan umat Islam pada umumnya. Bahkan ayat tersebut sungguh salah, menurut Yudian Wahyudi, jika dipahami sebagai kepemimpinan politik. Surat Al-Baqarah ayat 30, menurut Yudian Wahyudi, semata-mata informasi kepada para malaikat akan rencana menjadikan manusia sebagai *khalifah* Allah di bumi.

Kedua. Yudian Wahyudi juga menguatkan argumen kebahasaan kontra *khilafah* Q.S Al-Baqarah ayat 30 di atas dengan merujuk makna substansi ayat tersebut. Menurut Yudian, *khalifah* bukan berarti kepala negara, gubernur, bupati dan wali kota seperti dalam kepemimpinan politik saat ini. Pengertian *khalifah* pada ayat tersebut mencakup seluruh umat manusia dan berkenaan dengan identitas manusia sebagai pengelola bumi dan hamba Allah sekaligus. Ayat tersebut pada hakikatnya berbicara tentang SDM yang harus terus-menerus dirawat agar melahirkan generasi yang memiliki daya saing dan menang tanding.

Ketiga. Yudian Wahyudi selanjutnya menegasakan slogan *Khalifah “Yes”, Khilafah “No”*, karena tidak ada kata *khilafah* dalam Surat Al-Baqarah ayat 30, yang ada hanya *khalifah*. *Khalifah* sebagai SDM sangat dibutuhkan Indonesia (yes), bahkan banyak *khalifah* diberbagai bidang agar Indonesia bermutu, berdaya saing tinggi dan menang tanding. Menjadi *khalifah*, karenanya, dilakukan dalam sistem kenegaraan Indonesia yang ada, bukan dalam sistem *khilafah*. Oleh karena itu, *khilafah* tidak dibutuhkan di negara Pancasila ini. Menurut Yudian Wahyudi, selain karena sudah mati, *khilafah* juga secara historis tidak dijadikan konsesus bersama atau *ijma’* para *founding fathers* bangsa ini. *Ijma’* mereka adalah Pancasila.

Keempat. Upaya mendirikan *khilafah* di bumi Pancasila, menurut Yudian Wahyudi, bertentangan dengan ‘*ijma* (konsensus) para pendiri bangsa ini dalam bentuk Pancasila. *Ijma’* merupakan hukum tertinggi berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, tegas Yudian Wahyudi, melawan *ijma’* Pancasila berarti melawan Allah SWT, Tuhan YME.

DAFTAR PUSTAKA

- “Evolusi ISIS di Indonesia”, Laporan IPAC Report No.13, 24 September 2014
- Akso. *Modernisasi Pendidikan Islam Pondok Pesantren Nawesea Yogyakarta menjadi Lembaga Pendidikan Islam Unggul Kelas Dunia: Pendiri Prof K.H. Yudian Wahyudi, BA., BA., Drs., M.A., Ph.D.* Yogyakarta: Cakrawala, 2023.
- ar-Rifa'i, Muhammad Nasib. *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir, Jilid I.* Jakarta: Gema Insani Press, 1999.
- Hallaq, Wael B. *Ancaman Paradigma Negara Bangsa (Islam, Politik dan Problem Moral Identitas)*, terj. Akh. Minhaji. Yogyakarta: Suka Press, 2015.
- Nuroniyah, Wardah (ed.), *Membumikan Pancasila Kyai Yudian Wahyudi antara Buya Syafii Maarif dan Pendeta Andreas Yewangoe*. Yogyakarta: Cakrawala, 2023.
- Rafiuddin, Muhammad. “Mengenal Hizbut Tahrir (Studi Analisis Ideologi Hizbut Tahrir vis a vis NU”, *Islamuna: Jurnal Studi Islam*, Vol. 2, No. 1, 2015.
- Riyanto, Fajar Riyanto. *Universalitas Pancasila Yudian Wahyudi. Percikan Biografi Intelektual, Spiritual, dan Internasional*. Yogyakarta: Suka Press, 2021.
- Saidurrahman dan Azhari Akmal Tarigan. *Rekonstruksi Peradaban Islam: Perspektif Prof. K.H. Yudian Wahyudi, Ph.D.* Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Wahyudi, Yudian. “Perkuliahannya Mata Kuliah Studi Islam: Teks, Konteks, dan Metodologi”, Program Doktor (S3) Studi Islam, Pascasarjana, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Wahyudi, Yudian. *Dimanika Politik “Kembali Kepada al-Qur'an dan Sunnah” di Mesir, Maroko, dan Indonesia* . Yogyakarta: Nawasea Press, 2010.
- Wahyudi, Yudian. *Hukum Islam antara Filsafat dan Politik*. Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2015.
- Wahyudi, Yudian. *Maqashid Syari'ah dalam Pergumulan Politik. Berfilsafat Hukum Islam dari Harvard ke Sunan Kalijaga*. Yogyakarta: Nawasea Press, 2007.

Wahyudi, Yudian. *Ushul Fikih versus Hermeneutika: Membaca Islam dari Kanada dan Amerika*. Yogyakarta: Nawasea Press, 2007.

Waryani Fajar Riyanto, *Universalitas Pancasila Yudian Wahyudi*, hlm. 574.

INDEKS

INDEKS

A

- Adam ix, xi, xiii, xiv, xv, 3, 4, 5, 8, 16, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34
Al-asma' 10
Al-Baqarah ix, x, 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 27, 30, 33, 55
Al-Gazhali 41, 50
Ali Mustafa Yaqub 55
Al-Mujarrabat 85
Al-Munawwir 6, 25
ambi'hum 28
Amerika 6, 10, 11, 18, 43, 48, 74, 88
antropos 13, 14
antroposentris 71
Asian Islamic Universities Association 7, 45, 74
Asia Tenggara 29
ayat ii
Azyumardi Azra 41, 55, 60, 61

B

- backing 32
Balikpapan 6, 25, 42, 73
BAP 31, 32
berkaliber 5
Boston 6, 43, 73
BPIP 5, 7, 14, 45, 74
broker 32, 34

C

- capability 27

D

- dalil 7, 8, 15, 55, 56
Diponegoro 44, 84, 88
DI TII 14

E

- eksakta 68, 70, 71, 72, 75, 78, 79, 86
Epistemologi 23

F

- Faiq Tobroni iii, iv, ix, x, xi, xiii, xiv, 28, 70, 75
fardhu 'ain 76
fardhu kifayah 76
Filsafat 4, 6, 7, 17, 43, 44, 69, 73, 88
Filsafat Hukum Islam 6, 43
founding fathers 12, 16
fundamental 51, 52

G

- Guru Besar 5, 6

H

- hablumminallah 49
Hamka 54, 61
Harvard xvii, 5, 6, 7, 17, 35, 43, 44, 70, 73, 74, 76, 88
Hasbi's 25, 74
Hasyim Muzadi 54, 61
Hermeneutika 6, 18, 21, 23, 26, 33, 43, 74, 88
HTI x, xi, xv, 3, 11, 12
humaniora 10

I

- IAIN 5, 6, 25, 42, 43, 73
IAINT 79, 80
ibadah haji 48, 49
Iblis 31
Ibn Rusyd xviii, 41, 50
ijma' 12, 13, 15, 16
India 29
insâniyah 23, 24, 25, 33
Insan Kamil 41
iqro' 23
Islamic Studies x, 6, 34, 43, 44, 73, 74,
 81, 87
Islam kamil 50, 51, 53, 55
istathoah 49

J

- Jeddah 29
Jerman 6, 43
John O Voll xvii, xviii
Joko Widodo 7

K

- Kaffah 41, 50, 51, 54, 55, 56
kalâmullâh 33
Kalimantan Timur 25, 42
kalimatun sawa 15
Kanada 6, 18, 43, 45, 73, 74, 88
kauniyah 23, 24, 27, 33
K.C. Wheare xiv
khalifah "yes" 11, 12, 13, 15
khilafah "no" 11, 12, 13, 15
Kitab Suci 9
kontemporer 23, 33, 34, 41, 45, 69, 70,
 84, 86
kosmis 24, 46, 48, 49
kosmos 24, 46, 48
PKP 31
Krapyak 6, 25, 42, 73
Kuntowijoyo 14

L

- Lailaha Illallah 48
Lapas Nusa Kambangan 4
lisanul kaum xviii

M

- Madrasah Darut Ta'lim 6, 42
Maqashid Syari'ah xvii, 6, 7, 9, 17
Maroko 6, 17, 44, 74, 88
Massachusset 6
McGill 5, 6, 25, 43, 71, 73, 74, 76, 77,
 88
Medford 6, 43, 73
Mesir 6, 17, 44, 74, 88
Muallimin 42
Muhammadiyah xviii
mujtahid 41
multidimensi 77
multidisipliner 70
muqallid 41
muttabi' 41

N

- natural science 75, 78
NII 14
NKRI xi, xiii, xvi, xviii, 12
non-Muslim 47
novelty ix, x, xiii, 28, 34
Nurcholish Madjid xiii, xviii, 13, 26,
 44, 74

O

- OTT 31

P

- Pacitan 6, 25, 42, 73
PAUD 86
pemakzulan xiv, 27, 32
PKI 14
politik xiii, 4, 6, 8, 9, 11, 15, 16, 23, 24,
 29, 30, 45, 51, 52
politik modern 9

proposal 27, 30
PRRI 14
PTKIN 43, 76

Q

Quraish Shihab x, xiii, xviii, 34, 41,
54, 81, 87
qurâniyah 23, 33

R

Rabb 30, 32
revolusi prismatic xv
Rois Syuriah 45, 74
romantisme xvi, xvii
Roni Ismail iii, iv, ix, x, 3
rumah dinas 30, 32

S

Sahiron x, 23, 28, 29, 81, 87
salam 45
salamah 45
Samudera Hindia 47
Sayyid Quthub 41
SDIT xvii, 79, 86
SDM ix, x, xi, xii, xiii, 10, 12, 16
SDN 55 6, 42, 73
semesta 10, 24
Shalat Hajat 77
significance 25
SMAIT 79
SMPIT 79
Sunan Anbia xiii, 28, 74
Sunan Kalijaga x, xvii, 3, 6, 7, 8, 17,
23, 25, 35, 42, 43, 44, 45, 67,
73, 74, 88
supremasi xiv, 4
syajarah 30, 32

T

Tanah Pasundan 29
technological sciences xviii, 10
teologis 13, 24, 26, 46, 47, 48, 80
teoretis 24
teosentris 71
thagut 14
theois 14
Theory of Ijtihad 25, 74
TKIT 79, 86
transenden xviii
Tremas 6, 25, 42, 44, 70, 73, 74, 76,
84, 88
Tufts University 6, 43, 73

U

UGM 6, 25, 43, 73
ulul albab 70
Universität Göttingen 6
UNSIQ 45
'urf 25
Ushul Fikih 6, 18, 74, 81, 88
UUD 1945 xv, 9

W

wad'i 13
Wardah Nuronyah 13, 75, 82
Wonosobo 45, 74

Y

Yusuf Mansur 55, 60

TAJDID PANCASILAIS

PROF. K.H. YUDIAN WAHYUDI, Ph.D.



Buku ini membedah tajdid Prof. KH. Yudian Wahyudi, B.A, B.A., Drs., M.A., Ph.D. dalam kerangka Pancasila. Pembahasan pertama fokus pada penafsiran Yudian tentang ayat 30 hingga 39 dari Surat Al-Baqarah. Novelty Yudian diangkat oleh Roni Ismail dan Muhammad Solikudin dalam dua bab yang saling menguatkan. Adapun Reni Susanti coba mengkaji novelty lain dari Yudian, yaitu Islam sebagai proses.

Ke dua novelty Yudian di atas dilengkapi oleh Tri Wibowo, dengan cara dikaitkan dengan tajdid pendidikan integratif aplikatif Yudian dalam kerangka Pancasila. Dengan demikian, tajdid politik pendidikan Yudian sangat membumi karena, seperti ditegaskan oleh Dr. K. Faiq Tobroni, S.H.I, M.H. M.Sc., M.S.I. selaku editor, dilandaskan pada "akal, lesan dan nama Sang Kaum, yaitu Pancasila".

Selamat Membaca!

ISBN 978-623-7362-93-7

9 78623 7362937

CAKRAWALA
YOGYAKARTA

Rejowinangun, KG I/385
Rt. 27 Rw. 09 Kotagede, Yogyakarta
e-mail: cakrawalamind@gmail.com
www.cakrawalajogjakarta.com